

**PERAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) DI JAWA TIMUR UNTUK KEBIJAKAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN**

RENI SERI LESTARI - RENNY OKTAFIA

Perbankan Syariah

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Abstrak :

Di Jawa Timur pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Tujuan utama salah satu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Jawa Timur untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di Jawa Timur. Untuk mendukung perekonomian di Jawa Timur UMKM perlu pembangunan rakyat dan pembangunan sumber daya manusia melalui pengetahuan dan teknologi untuk bertahan hidup dan terus tumbuh bisa melalui akses modal melalui keuangan mikro syariah oleh lembaga LKMS untuk program kemitraan bisa memberikan modal maksimum untuk UMKM. Untuk LKMS harus diperkuat kelembagaannya dapat diwujudkan untuk menerapkan Bank Syariah.

Kata Kunci : *Peran UMKM, LKMS, kemiskinan dan pengangguran*

Pendahuluan

Pada tahun 2016 di Jawa Timur kondisi perekonomian yang cukup signifikan, dibandingkan kondisi perekonomian pada tahun 2015. Peran UMKM telah masa krisis ekonomi hingga saat ini. Bisa dilihat dari besaran angka pertumbuhannya pada triwulan I tahun 2015 sebesar 5.05 %, sedangkan pada triwulan II tahun 2016 menjadi sebesar 5.34%. (Renny Oktafia, 2017)

timbulnya kemiskinan dikarenakan oleh rendahnya kemampuan masyarakat mengakses lapangan kerja dan sedikitnya peluang masyarakat untuk mendapatkan kesempatan kerja. Kondisi dampak buruknya banyak tenaga kerja yang di PHK oleh perusahaan untuk mengatasi keadaan pemerintah bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat, mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi, serta kemiskinan dan pengangguran. Pendapatan daerah dapat mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). (Anis Setiyawati, 2007)

pendapatan dan belanja daerah bisa digunakan sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan mengatasi kemiskinan. Penurunan PAD terjadinya dampak penurunan target pajak pendapatan daerah, bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Peran UMKM juga telah teraktualisasi pada masa krisis hingga saat ini. Selama masa krisis ekonomi hingga kini, keberadaan UMKM mampu sebagai faktor penggerak utama ekonomi Indonesia. Terutama ketika krisis kegiatan investasi dan pengeluaran pemerintah sangat terbatas, maka pada saat itu peran UMKM sebagai bentuk ekonomi rakyat sangat besar. UMKM, berjuan adalah agar keberadaan UMKM ke depan semakin berkembang, sehingga mampu membantu program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, sebenarnya bukan hal yang baru. Namun, pemerintah baru sadar setelah terjadi krisis, bahwa kebijakan pemerintah selama ini menghasilkan fundamental perekonomian nasional yang rapuh, sehingga ke depan membutuhkan penanganan yang lebih serius karena tantangan semakin berat (P. Eko Prasetyo, 2008).

PEMBAHASAN

Fungsi dan Peran UMKM dalam perekonomian

Fungsi dan peran UMKM di Indonesia secara ekonomi-sosial-politik untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Fungsi dan peran UMKM ini sangat penting hingga belum ada definisi dan teori yang baku untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada pada UMKM di Indonesia. Sedangkan teori yang ada di Barat tidak dapat dipaksakan mentah-mentah untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia. Namun ada beberapa ciri-ciri spesifik, yaitu UMKM sebagai salah satu organisasi ekonomi bisnis yang memiliki struktur sangat sederhana, sedikit aktivitas yang diformalkan, teknologi yang sederhana, manajemen yang lentur, sulit membedakan kekayaan pribadi dengan aset usahanya, administrasi yang sederhana (bahkan sering tidak memiliki) serta tanpa elaborasi.

UMKM Dalam struktur perekonomian Indonesia merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang produktif, keberadaannya yang mendominasi lebih dari 99% dalam struktur perekonomian nasional. Di satu sisi keberadaannya dianggap sebagai penolong karena lebih mampu bertahan di masa krisis ekonomi serta menjadi tumpuan harapan masyarakat. Karena keberadaannya mampu banyak menyediakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan arus urbanisasi serta pengendara penggerak pembangunan nasional dan daerah. Di antara lain, keberadaannya juga masih banyak menghadapi kendala dan keterbatasan baik secara internal maupun eksternal. (P. Eko Prasetyo, 2008)

Dampak krisis ekonomi yang dialami oleh negara masih belum pulih benar sampai saat sekarang ini. Salah satu pondasi perekonomian yang diharapkan dapat memulihkan krisis ekonomi yang terjadi melalui sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam potensi UMKM sangat besar menyerap tenaga kerja terus menerus ditingkatkan dan dimaksimalkan. Karena, UMKM harus didukung dengan penerapan aturan yang kondusif, yang tidak memberatkan pelaku UMKM. Sementara, UMKM saat ini masih banyak yang harus menanggung banyaknya pungutan dan pengurusan perijinan yang menghabiskan biaya yang mahal. Peraturan yang kurang mendukung UMKM menjadikan hal yang kontraproduktif terhadap keberlangsungan UMKM. Pihak pemerintah seharusnya

memberikan kemudahan terlebih dahulu, baru kemudian meminta hak. Yang perlu diperhatikan oleh UMKM bagaimana pemerintah bisa menerapkan sistem syariah Islam, untuk menjalankan usahanya sehingga bisa dapat keberkahan dalam usaha. Untuk mewujudkan sistem Islami, maka UMKM dapat menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan mikro syariah. Kemitraan tidak hanya berdampak dalam terjadinya sistem Islami, tetapi juga bisa mendukung struktur permodalan UMKM. Pengembangan UMKM melalui integrasi dengan lembaga keuangan mikro syariah, bisa dilakukan melalui beberapa hal lain diantaranya : melakukan upaya menciptakan SDM yang Islami dan berkualitas, menciptakan jaringan antar pelaku bisnis, serta menciptakan sebuah sistem informasi dan data yang berisi potensi usaha UMKM yang dapat disinergikan dengan lembaga keuangan mikro syariah.

Jumlah UMKM di Jawa Timur sampai saat ini, berada diangka sekitar 6.825.931 UMKM yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di wilayah Jawa Timur. Terdapat 2 (dua) kabupaten di Jawa Timur yang memiliki jumlah UMKM yang terbesar, yaitu kabupaten Malang dan kabupaten Jember. UMKM yang berjumlah hampir 7 (tujuh) juta, yang bergerak diberbagai sektor, mulai dari sektor pertanian sampai dengan sektor jasa. Dengan jumlah UMKM yang ada di Jawa Timur yang cukup besar, mampu menyerap tenaga kerja yang besar, yaitu sekitar 11.117.439 tenaga kerja. UMKM yang paling besar menyerap tenaga kerja berada di kabupaten Malang, yaitu sebesar 826.375 tenaga kerja.

Memurut data diatas, dampak potensi UMKM dapat menyerap tenaga kerja, akan membantu pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran. Karena itu, UMKM yang ada di Jawa Timur perlu terus didorong, sehinggalebih banyak lagi tenaga kerja yang terserap, sampai pada akhirnya diharapkan tidak ada lagi pengangguran di Jawa Timur. Untuk mendorong UMKM agar terus berkembang dan bisa dapat tumbuh dengan cepat, maka perlu didukung dengan permodalan yang memadai pula, sehingga usaha akan mengalami peningkatan dari segi kapasitas bisnisnya. Selama ini, UMKM terutama yang di sektor mikro, sering mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan ke lembaga perbankan.

Upaya memperkuat lembaga keuangan mikro syariah, bisa melalui kemitraan dengan linkage program. Upaya perkuatan bisa mendorong melalui unsur-unsur yang berada di internal maupun eksternal lembaga keuangan syariah, agar dapat berfungsi secara maksimal.

Faktor-faktor internal antara lain : *pertama*, aspek Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu bagaimana dapat meningkatkan kapasitas SDM; *kedua*, aspek manajemen yaitu tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen

(SOM); *ketiga*, aspek permodalan yaitu berupa bantuan dana untuk memperkuat permodalan dari pemerintah; *keempat*, aspek jangkauan pasar yaitu besarnya jumlah nasabah; *kelima*, aspek inovasiproduk yaitu bagaimana dapat menciptakan produk yang kompetitif.

faktor-faktor eksternalnya sendiri, terdiri 3 (tiga) aspek yaitu : *pertama*, aspek regulasi yang dimaksud adalah sistem regulasi pemerintah yang mendukung lembaga keuangan mikro syariah; *kedua*, aspek pengawasan yaitu terkait dalam sistem pelaporan dan pengawasan eksternal; *ketiga*, aspek infrastruktur yaitu terkait dengan keberadaan lembaga induk serta keberadaan lembaga penjamin simpanan. (Renny Oktafia, 2017)

Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Indonesia, tersebar di hampir seluruh wilayah di nusantara. Demikian, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang jumlahnya semakin bertambah seiring perkembangan trend masyarakat, yang mulai mengarah ke lembaga keuangan syariah. Kondisi sekarang, keuangan mikro dapat dijadikan sebagai salah satu pendekatan dalam menyelesaikan masalah-masalah pengentasan kemiskinan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi, melalui penyaluran untuk kegiatan ekonomi produktif. Lembaga keuangan mikro dapat membuat pola kelompok, untuk penyaluran dana. Dalam satu kelompok terdapat beberapa individu yang saling bertanggungjawab terhadap pelunasan pinjaman seluruh anggota kelompok. Oleh karena itu, bisa menyebabkan salah satu anggota yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka akan menghambat penyaluran pinjaman anggota lainnya dalam kelompok. Penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat menengah kebawah dengan nominal yang kecil, untuk kelangsungan aktivitas usahanya, merupakan esensi dari keuangan mikro. Konteks ini, dapat dikatakan dengan sesuai pandangan Islam, bahwa ketika seseorang mendapatkan kesulitan, maka diberikan kelebihan dan harus memberikan pertolongan. Karena itu, keuangan mikro syariah memberikan solusi dengan memberikan layanan jasa keuangan dan non keuangan, yang dilandaskan pada nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

Lembaga keuangan mikro syariah memiliki dua fungsi yang melekat, yaitu fungsi sosial dan fungsi bisnis. Dengan potensi fungsi lembaga keuangan mikro yang cukup besar dapat dikembangkan untuk memperkuat perekonomian masyarakat melalui pembiayaan mikro. Oleh karena itu, dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Hal ini, salah satu upaya yang dilakukan oleh

pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dengan memperkuat peran lembaga keuangan mikro dalam penyediaan modal untuk berwirausaha. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait dalam sistem keuangan, harus berpihak kepada rakyat kecil dan orang yang usaha mikro. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), merupakan bagian penting dalam memperkuat perekonomian bangsa, sebab sektor UMKM memiliki porsi terbesar dalam skala bisnis di Indonesia.

Faktor lain yang perlu diperhatikan, dalam pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah adalah bagaimana sistem yang digunakan dalam pengoperasian lembaga tersebut. Pasa saat ini, lembaga keuangan mikro syariah dalam pengoperasian lebih banyak mengarah ke komersialisasi. Kondisi ini dipicu karena sumber pendapatan terbesar berasal dari dana komersial masyarakat. Jika kondisi ini terus terjadi, maka tujuan lembaga keuangan mikro untuk pengentasan kemiskinan tidak akan terwujud dan tidak akan bisa terjadi.(Renny Oktafia, 2017)

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat saya simpulkan bahwa Peran keberadaan UMKM yang paling menonjol adalah kemampuannya di dalam penyerapan tenaga kerja (mengurangi pengangguran). Kebanyakan orang yang kreatif, inovatif, ulet dan memiliki etos kerja tinggi, justru demikian menjadi lebih menarik untuk mendirikan UMKM. Sebab, mereka akan merasa lebih bebas, dan sadar bahwa usaha besar juga dimulai dari usaha kecil yang berpotensi untuk berkembang besar. Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat semakin cepat pergerakannya, melalui peran dan dukungan dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Dengan program-program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan LKMS, dapat semakin memperkuat UMKM dalam memperluas skala usahanya. Untuk bisa semakin meningkatkan perannya, dalam memberikan pelayanan pembiayaan yang maksimal kepada UMKM, maka LKMS perlu diperkokoh juga secara kelembagaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Oktafia, Renny, 2017, *percepatan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui perkuatan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) di jawa timur*, Percepatan Pertumbuhan UKM, Sidoarjo
- Setiyawati, Anis, 2007, *Analisis pengaruh PAD, DAU, DAK, dan belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran*, Vol.4, No. 2
- Prasetyo, P, Eko, 2008, *peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan dan penganggura*, Akmenia Upy, Vol 2